



LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)

2021

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya semata Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi laporan ini menguraikan tentang gambaran informasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya mencakup gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, keberhasilan maupun tidak keberhasilan, inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2021, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk tahun 2021 ini kemudian

dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Lumajang, 17 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini disusun. LKJIP ini menyampaikan capaian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selama tahun 2021 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKJIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari keseluruhan bidang tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, tentunya tidak hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan namun juga dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum dalam rangka mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	3
B. Gambaran Umum dan Tupoksi	3
1. Kondisi Kepegawaian	4
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
1. Tujuan	8
2. Sasaran	8
3. Strategi dan Kebijakan	9
4. Program dan Kegiatan	9
5. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran	10
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	12
B. Perjanjian Kinerja	21
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	22
B. Akuntabilitas Keuangan	46
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (*user*). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku

pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya *e-government* merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, dapat menjadi agen manajemen informasi sekaligus sebagai *public relation* seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Sebagai bentuk tanggung jawab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2021 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2021, sehingga LKJIP ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

3. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dibatasi pada Penyajian Kinerja yang terkait dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

B. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang pesandian yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 66 orang yang terdiri dari 25 orang PNS dan 41 orang Tenaga Honorar.

Berikut kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Formasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	Tenaga Honorer		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0
3	SMA/SMK	7	16	23	35 %
4	D3	5	2	7	11 %
5	S1	11	22	33	50 %
6	S2	2	1	3	5 %
Jumlah		25	41	66	100%

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan informatika memiliki pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) yaitu 50% (33 orang). Sedangkan untuk jenjang SMA/ SMK sebanyak 35% (23 orang), SMP sebesar 5% (0 orang) dan D3 sebesar 11% (7 orang). Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 berdasarkan Pangkat/ Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	24%
3	Golongan III	17	68%
4	Golongan IV	2	8%
Jumlah		25	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagian besar Golongan Ruang III yaitu sebanyak 68% (17 orang), Golongan II yaitu sebanyak 24% (6 orang) dan Golongan IV yaitu sebanyak 8% (2 orang) dan golongan I sebanyak 0 % (0 orang). Disamping pendidikan formal, pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural

No	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1	I	0
2	II	0
3	III	1
4	IV	6
Jumlah		7

Sedangkan jika dilihat berdasarkan eselon maka ditunjukkan oleh Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Berdasarkan Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	IIb	1
2	IIIa	1
3	IIIb	3
4	IVa	11
Jumlah		16

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
01	01	GOLONGAN TANAH	0			
	01.01.	- Tanah	0	-	-	-
02	02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	691			

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	02.02.	- Alat-Alat Besar	2	2	-	-
	02.03.	- Alat-Alat Angkutan	17	17	-	-
	02.04.	- Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	1	-	-
	02.05.	- Alat-Alat Pertanian	0	-	-	-
	02.06.	- Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	621	621	-	-
	02.07.	- Alat-Alat Studio & Komunikasi	50	50	-	-
	02.08.	- Alat-Alat Kedokteran	0	-	-	-
	02.09.	- Alat-Alat Laboratorium	0	-	-	-
	02.10.	- Alat-Alat Persenjataan / Keamanan	0	-	-	-
03	03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	9	9	-	-
	03.11.	- Bangunan Gedung	9	9	-	-
	03.12.	- Monumen	0	-	-	-
04	04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	0	-	-	-
	04.13.	- Jalan Dan Jembatan	0	-	-	-
	04.14.	- Bangunan Air / Irigasi	0	-	-	-
	04.15.	- Instalasi	0	-	-	-
	04.16.	- Jaringan	0	-	-	-
05	05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	0	-	-	-
	05.17.	- Buku Dan Perpustakaan	0	-	-	-
	05.18.	- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	-	-	-
	05.19.	- Hewan, Ternak Dan Tanaman	0	-	-	-
06	06	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	-	-	-

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang serta dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

a. Tugas

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang pesandian.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK yang terpadu.

Indikator sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK yang terpadu” adalah Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu, yang dihitung dengan formula Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu dibagi Jumlah PD yang ada dikali 100%.

- b) Meningkatkan Implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Indikator sasaran “Meningkatnya Implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik” adalah Persentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi. yang dihitung dengan formula Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik dibagi jumlah badan publik dikali 100%.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:
 - a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan:
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Manajemen Komunikasi Krisis
 - Layanan Hubungan Media
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:
 - a) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - b) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan sub kegiatan:

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan kegiatan:

a) Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektorial
- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektorial

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dicapai melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas administrasi, sarana dan prasarana perkantoran serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK.
3. Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Sosial
4. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik
5. Meningkatnya jumlah data yang dimutakhirkan
6. Meningkatnya Pengamanan informasi di Bidang Persandian
7. Meningkatnya jumlah saluran penyampaian Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

6. Rencana Kerja Tahunan

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik	3.559.910.110,00
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah saluran opini yang dipantau	31.980.000,00
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	142.320.000,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	222.462.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dikelola	302.113.000,00
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	119.147.800,00
	Layanan Hubungan Media	Jumlah berita yang dipublikasikan	1.491.338.280,00
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah	284.109.430,00

	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	473.003.200,00
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	93.670.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif	399.766.400,00
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	1.020.651.200,00
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	150.000,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	14.160.000,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website/aplikasi yang dipantau	19.824.000,00

	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peserta pertemuan forum TIK	3.000.000,00
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	508.117.200,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	9.000.000,00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	263.400.000,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Peserta Forum Smart City	203.000.000,00
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	185.582.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	44.338.000,00
	Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah SDM yang dibina	9.000.000,00

	Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	132.244.000,00
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	68.297.400,00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah informasi yang bersandi	46.020.000,00
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi	22.277.400,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	3.500.686.503,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	4.881.600,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2.569.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.476.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1.732.800,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2.752.800,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	2.338.245.975,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	59.502.960,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	4.380.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.313.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	2.517.240,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	3.725.600,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	5.913.100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	3.016.800,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1.732.250,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	8.700.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	40.294.400,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	29.333.900,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	9.076.870,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	86.328.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	23.868.900,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	4.204.200,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	4.650.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	175.459.200,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	616.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	3.228.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	246.428.208,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	248.088.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	138.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	6.700.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40.450.000,00
--	--	---------------

B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	85%
2.	Program Aplikasi Informatika	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	90%
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	98%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggungjawaban atas suatu kewajiban, sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah **LKJIP**.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang 2021 secara umum dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian merupakan hasil dari suatu Penilaian yang sistematis dan didasarkan pada *Kelompok Indikator Kegiatan* yang berupa indikator masukan (**Input**), Indikator Keluaran (**Output**), Indikator Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), dan Dampak (**Impact**). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan yang bersifat kuantitatif dan

kualitatif tersebut dilakukan agar lebih terukur dan mudah dievaluasi pada setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur dengan benar pencapaiannya. Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara menyeluruh. Capaian Kinerja diukur dengan mengukur capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan dengan akuntabilitas keuangan dari program dan kegiatan tersebut dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran. Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal sebagaimana tabel di bawah ini :

NO. URUT	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	≤ 55%	Kurang Berhasil
2.	56% s/d 70%	Cukup Berhasil
3.	71% s/d 85%	Berhasil
4.	≥ 86%	Sangat Berhasil

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja merupakan Hasil Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 digambarkan dengan Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana komitmen kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disinggung pada Bab II di atas. Gambaran ketercapaian Indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana tahapan proses berikut :

MISI 3 :

“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.”

Berdasarkan hasil rumusan Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas dapat dijabarkan lebih lanjut Tujuan dari Perangkat Daerah (PD) yang akan menjadi Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah. Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Dari Sasaran Perangkat Daerah (PD) dirumuskan pula indikator Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu
2. Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik

Capaian Kinerja dari Sasaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja Sasaran ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\% \Rightarrow \frac{47}{52} \times 100\% = 90,38\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \times 100\% \Rightarrow \frac{47}{71} \times 100\% = 66,19\%$$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	90%	90,38%	Sangat Berhasil
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	85%	66,19%	Cukup Berhasil

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut di atas dapat dicapai oleh Indikator Kinerja dengan rumusan dari Indikator tersebut yaitu Terlaksananya fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Kominfo, Terlaksananya Pengembangan Website, Terlaksananya Pengelolaan Radio Suara Lumajang, dan Terlaksananya Forum PPID.

Tingkat Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator mengalami peningkatan. Dari 2 (dua) indikator semuanya mencapai target yang diharapkan pada Indikator yang mendukung misi ketiga, yaitu mewujudkan Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi, capaian target pada tahun 2020 dan 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan. Gambaran Realisasi Indikator Kinerja Strategis dapat

disajikan melalui tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	90%	90,38%	100%
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	85%	66,19%	77,87%

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dipenuhi oleh tercapainya program-program yang dilaksanakan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas. Dalam upaya mewujudkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dari Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran.

a) Perbandingan Target dan realisasi indikator sasaran pada

sasaran strategis ketiga

SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2020			PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	80%	80,77%	TERCAPAI	90%	90,38%	TERCAPAI
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	83%	100%	TERCAPAI	85%	66,19%	TIDAK TERCAPAI

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang beberapa indikator kinerja sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata pada tabel diatas. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa belum secara keseluruhan realisasi capaian kinerja tahun 2021 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis dibandingkan dengan tahun 2020. Jika dilihat capaian kinerja tahun 2021, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini mengalami penurunan pada salah satu indikator. Secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 90,3 % pada tahun 2020 turun menjadi 78,3 % pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar 12 %. Meningkatnya target capaian pada indikator sasaran “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)” selaras dengan tercapainya target capaian pada RPJMD Provinsi yaitu Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Selanjutnya, dengan menurunnya target capaian kinerja pada indikator sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya

implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik” pada rencana Strategis Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 tentunya juga berimplikasi terhadap peningkatan target capaian pada sasaran RPJMN yaitu Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Peningkatan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang bisa tercapai karena terlaksananya komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan terpercaya. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah dengan menerapkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya penerapan *e-government*, pemerintah daerah dituntut untuk semakin cepat dalam penyaluran informasi pada Masyarakat. Dalam hal ini seluruh PD diuntut untuk selalu memberikan informasi terbaru karena apabila dilihat secara fakta, ada beberapa informasi yang tidak tersalurkan ke masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yang berimplikasi dengan peningkatan capaian sasaran strategis yaitu dengan diperlukan penyediaan anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana dan prasarana TIK yang memadai dan memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Dukungan dari pimpinan juga sangat mempengaruhi peningkatan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program sehingga para pelaksana program kegiatan bisa merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 dengan baik.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)			TINGKAT EFI SIENSI (%)	KET.
			PAGU PAK (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Pelayanan pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.386.529.822,00	4.862.506.293,00	524.023.529,00	10,78	
	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.510.547.330,00	1.478.534.363,00	32.012.967,00	2,12	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	Program Aplikasi Informatika	586.783.200,00	578.371.800,00	8.411.400,00	1,43	
	Meningkatkan Layanan Data dan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	31.929.500,00	31.918.700,00	10.800,00	0,03	
	Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	30.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	40	

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK yang Terpadu dan Meningkatnya Keterbukaan Informasi Oleh Badan Publik secara keseluruhan sudah mencapai efisiensi yang cukup baik. Berdasarkan Tabel diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian efisien yang cukup baik dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat Program yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mengalami penurunan setiap tahunnya akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun sementara disisi lainnya tidak ada penerimaan pegawai baru. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia juga dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

c. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2021 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:

a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

- a) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- b) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

- a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

Dengan Sub Kegiatan:

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Perbandingan target dan Realisasi masing-masing Program yang disajikan

Seluruh program kegiatan diatas ditujukan untuk mencapai target dari 2 indikator sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2021 dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang seluruh indikator realisasinya mencapai target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sehingga masih ada satu indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pandemi covid-19 sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah sehingga harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

e. Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Pengumpulan Data dan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan secara optimal pada tahun 2021. Selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Capaian pada tahun 2021 secara berkala dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh bidang-bidang yang ada.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2021		Realisasi		Capaian		EFISIENSI		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	80	%	123.074.000	80	%	120.212.646	100%	98%	2%
			Persentase diseminasi informasi publik	100	%	1.387.473.330	100	%	1.358.321.717	100%	98%	2%
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	82	KIM	123.074.000	82	KIM	120.212.646	100%	98%	2%
			Jumlah konten informasi yang dipublikasikan	400	konten	1.387.473.330	400	konten	1.358.321.717	100%	98%	2%
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah saluran opini yang dipantau	3	saluran	27.275.000	3	saluran	27.256.666	100%	100%	0%
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	172	ppid	50.380.000	35	ppid	49.646.980	20%	99%	-78%
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	41	KIM	45.419.000	41	KIM	43.309.000	100%	95%	5%
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	12	laporan	120.000.000	12	laporan	120.000.000	100%	100%	0%
		Layanan Hubungan Media	Jumlah berita yang dipublikasikan	500	berita	350.749.330	500	berita	347.090.380	100%	99%	1%
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	6	Jenis Konten	208.398.000	6	Jenis Konten	208.285.000	100%	100%	0%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

2	Meningkatnya pelayanan pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK yang terpadu	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dikelola	6	media	288.981.000	5	media	267.862.666	83%	93%	-9%
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	90	%	586.783.200	90	%	578.371.800	100%	99%	1%
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1	Domain	7.938.000	1	Domain	7.843.000	100%	99%	1%
				264	Subdomain		264	Subdomain				
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	1	Domain	150.000	1	Domain	55.000	100%	37%	63%
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1	Domain	7.788.000	1	Domain	7.788.000	100%	100%	
				264	Subdomain		264	Subdomain				
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal	1	Pusat Data	578.845.200	1	Pusat Data	570.528.800	100%	99%	1%
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1	Pusat Data	496.117.200	1	Pusat Data	489.818.200	100%	99%	1%
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website/aplikasi yang dipantau	44	Website	11.328.000	44	Website	11.328.000	100%	100%	0%
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	45	website/aplikasi	68.400.000	38	website/aplikasi	66.400.000	84%	97%	-13%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	80	Orang	3.000.000	89	Orang	2.982.600	111%	99%	12%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1	Sistem	31.929.500	1	Sistem	31.918.700	100%	100%	0%
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	24	Data	31.929.500	24	Data	31.918.700	100%	100%	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	24	Data	819.500	24	Data	814.000	100%	99%	1%		
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dibina	80	Orang	2.250.000	80	Orang	2.244.700	100%	100%	0%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3	Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	24	Data	28.860.000	24	Data	28.860.000	100%	100%	0%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	90	%	30.000.000	90	%	18.000.000	100%	60%	40%
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	10	PD	30.000.000	10	PD	18.000.000	100%	60%	40%
4	Meningkatnya Pelayanan pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah informasi yang bersandi	375	informasi	30.000.000	120	informasi	18.000.000	32%	60%	-28%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	98	%	5.386.529.767	98	%	4.862.506.293	100%	90%	10%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98	%	7.072.400	98	%	7.017.000	100%	99%	1%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7	Jenis	2.304.000	7	Jenis	2.304.000	100%	100%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2.125.400	2	Dokumen	2.119.000	100%	100%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	518.000	1	Dokumen	516.000	100%	100%	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1	Dokumen	680.000	1	Dokumen	673.000	100%	99%	1%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2	Dokumen	1.445.000	2	Dokumen	1.405.000	100%	97%	3%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98	%	2.569.518.614	98	%	2.558.841.370	100%	100%	0%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25	ASN	2.517.624.139	25	ASN	2.509.782.465	100%	100%	0%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2	Fasilitasi	50.526.475	2	Fasilitasi	47.710.905	100%	94%	6%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1	Fasilitasi	0	0	Fasilitasi	-	0%	0%	0%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	jenis	888.000	1	jenis	884.000	100%	100%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3	jenis	480.000	3	jenis	464.000	100%	97%	3%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	98	%	1.470.000	98	%	1.470.000	100%	100%	0%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0%	0%	0%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2	Fasilitasi	1.470.000	2	Fasilitasi	1.470.000	100%	100%	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98	%	2.017.449.155	98	%	1.559.388.030	100%	77%	23%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	1	Jenis		0	Jenis		0%	0%	0%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	2	Fasilitasi	3.264.000	2	Fasilitasi	3.257.000	100%	100%	0%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1	Laporan	888.000	1	Laporan	884.000	100%	100%	0%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	3	ASN	0	0	ASN	0	0%	0%	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	10	ASN	2.013.297.155	8	ASN	1.555.247.030	80%	77%	3%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	11	ASN	0	0	ASN	0	0%	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98	%	236.286.630	98	%	218.876.820	100%	93%	7%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10	Jenis	4.586.340	10	Jenis	4.586.340	100%	100%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4	Jenis	81.435.340	4	Jenis	79.543.900	100%	98%	2%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2	Jenis	23.741.850	2	Jenis	23.270.800	100%	98%	2%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	1	Jenis	2.102.100	1	Jenis	1.440.000	100%	69%	31%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1	Fasilitasi	4.650.000	1	Fasilitasi	3.551.000	100%	76%	24%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2	Fasilitasi	119.771.000	2	Fasilitasi	106.484.780	100%	89%	11%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98	%	616.000	98	%	600.000	100%	97%	3%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	Jenis	616.000	7	Jenis	600.000	100%	97%	3%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1	Jenis	0	1	Jenis	0	100%	0%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1	Jenis	0	1	Jenis	0	100%	0%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98	%	446.048.968	98	%	412.086.648	100%	92%	8%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2	Fasilitasi	1.728.000	2	Fasilitasi	1.722.000	100%	100%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3	Rekening	203.447.968	3	Rekening	172.172.164	100%	85%	15%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4	Fasilitasi	240.873.000	4	Fasilitasi	238.192.484	100%	99%	1%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98	%	108.068.000	98	%	104.226.425	100%	96%	4%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	4	Kendaraan	91.818.000	4	Kendaraan	87.976.425	100%	96%	4%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	1	Jenis	0	0	Jenis	0	0%	0%	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	Jenis	16.250.000	3	Jenis	16.250.000	100%	100%	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	1	Jenis	0	0	Jenis	0	0%	0%	0%
				Capaian Rata-rata Program				83%		
				Capaian Rata-rata Kegiatan				100%		



Gambar 1. Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata Program sebesar 83%. Dari 5 Program hanya ada satu Program yang targetnya tidak tercapai yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi dimana dari target yang direncanakan sebesar 100% hanya tercapai sebesar 32 %. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki capaian yang rendah dikarenakan oleh beberapa faktor yakni Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program tersebut.

Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi covid-19 sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Program tersebut. Pengumpulan data kinerja telah didukung dengan penetapan mekanisme/SOP namun belum dilaksanakan secara optimal. Monitoring atas capaian kinerja sudah dilakukan dengan menyertakan data pengukuran kinerja dan dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2021 yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang (Gambar. 1).

c) Akuntabilitas Kinerja Lainnya

Pada bagian ini diuraikan inovasi dan Prestasi yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai beberapa inovasi yaitu:

Inovasi :

1. LAPOR LUMAJANG ON AIR

Setelah sukses menggunakan saluran laporan atau keluhan warga melalui Grup Facebook Lapor Lumajang, kini Dinas Kominfo akan merilis satu inovasi lagi yang berkaitan dengan penyerapan opini dan aspirasi publik. Inovasi baru ini bernama Lapor Lumajang On Air. Nama inovasi ini terbentuk dari gabungan dua frasa yaitu frasa Lapor Lumajang dan frasa On Air. Frasa Lapor Lumajang merujuk kepada saluran laporan yang sudah dimiliki sebelumnya yang menggunakan platform Facebook Group. Dalam grup ini warga melapor dengan cara menuliskan laporannya di

dinding grup Lapor Lumajang untuk kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Frasa On Air merujuk kepada kegiatan siaran di udara melalui stasiun radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Kominfo yaitu LPPL RSL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang). Sebagai radio yang melakukan siaran setiap hari, RSL sangat mungkin untuk menyerap opini publik dalam bentuk apapun misalnya laporan atau keluhan.

LAPOR LUMAJANG ON AIR merupakan gabungan dari kedua fasilitas pelaporan publik ini. Untuk merealisasikan program ini perlu ada kesepakatan dari dua bidang yang ada di Dinas Kominfo yaitu Bidang Informasi Publik (BIP) dan Bidang Komunikasi Publik (BKP). Setiap laporan yang masuk dalam FB Grup Lapor Lumajang akan menjadi *feed* (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL. Bila memungkinkan, penyiar radio akan langsung menghubungi pejabat yang berwenang untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut. Semua rekaman tanggapan akan disimpan dan di-*publish* di website www.laporlumajang.com untuk dibaca masyarakat. LAPOR LUMAJANG ON AIR bertujuan untuk mempercepat proses tanggapan dari sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan. Selain itu, jangkauan dari laporan ini akan menjadi lebih luas karena segmentasi pendengar RSL bisa berbeda dengan segmentasi pembaca FB Grup Lapor Lumajang

2. ODOMOM (ONE DAY ONE NEWS AND MORE)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai inovasi untuk meningkatkan produksi pemberitaan terkait program dan kebijakan pemerintah kepada publik, pelayanan publik dan partisipasi publik dalam membangun daerah yang dipublikasikan melalui website resmi Pemkab Lumajang www.lumajangkab.go.id dan pada website pemerintah pusat di Rubrik Nusantara www.infopublik.id. Upaya tersebut dilakukan, agar dapat mengomunikasikan program atau kebijakan publik secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami, serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan.

3. FOTOMATIS (FOTO PRODUK DAN PROMOSI GRATIS)

Penyebaran virus corona yang cepat membuat semua orang menjadi was-was untuk keluar rumah dan bersentuhan dengan apapun sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja dari rumah melalui media online guna menghindari kontak langsung dengan lingkungan luar rumahnya. Hal ini yang membuat penjualan produk melalui media online belakangan ini naik secara signifikan. Berbeda dengan belanja langsung di toko, dalam belanja online pada online shop pembeli tidak bertemu. Tapi mereka bebas memilih beraneka macam produk melalui tampilan atau contoh

gambar. Sehingga saat ini banyak pelaku bisnis online dan UMKM yang berlomba-lomba untuk menampilkan gambar terbaik dari produknya dengan harapan menarik minat calon pembeli. Sebagian dari mereka bahkan rela mengeluarkan dana ekstra yang tidak sedikit untuk menyewa fotografer handal guna menghasilkan gambar yang menarik karena dalam bisnis online gambar mengambil peran penting dalam laku tidaknya sebuah produk terutama produk yang baru diluncurkan di pasar.

Namun masalah baru muncul bagi pebisnis pemula atau UMKM yang baru saja menggeluti bisnis online yang rata-rata memulai bisnis dengan modal terbatas. sehingga tentu berat buat mereka untuk menyewa fotografer profesional. tidak heran jika kondisi ini membuat UMKM sering kali kalah bersaing bukan karena kualitas produk mereka tapi hanya karena foto produk yang di tampilkan tidak menarik. FOTOMATIS yang merupakan singkatan dari Foto Produk dan Promosi Gratis, adalah sebuah program inovasi dari Diskominfo yang mencoba hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat pebisnis online terutama UMKM. melalui program ini Diskominfo akan membantu UMKM di Kabupaten Lumajang untuk menghasilkan foto produk terbaik yang akan mereka gunakan sebagai display promosi mereka di media online. Sehingga UMKM dapat fokus kepada perbaikan mutu dan kualitas produk serta strategi penjualan tanpa harus bersusah payah memikirkan design ataupun display foto produk mereka lagi.

4. GUINEMA

Guided News Maker bisa disebut GUINEMA merupakan inovasi untuk membuat berita terpandu. Aplikasi ini diperuntukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang hingga kini masih lemah dalam hal penulisan berita dan berakibat minimnya pasokan berita atau informasi dari KIM. Tujuan aksi perubahan ini dirumuskan menjadi tiga tujuan yaitu: Tujuan Jangka Pendek, Tujuan Jangka Menengah, dan Tujuan Jangka Panjang. KIM adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak memiliki bekal kemampuan jurnalistik atau tulis menulis berita, oleh karena itu perlu sebuah terobosan inovasi untuk mengatasi problem tersebut. Inovasi yang diajukan berbentuk aplikasi yang dinamakan "Guided News Maker" (Guinema) atau pembuat berita terpandu. Dengan aplikasi ini, masalah ketidakmampuan KIM dalam menulis berita akan teratasi. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, KIM akan bisa membuat berita dengan mudah. aplikasi "Guided News Maker" ini sebagai terobosan inovasi dengan berbagai alasan. Aplikasi ini akan sangat membantu para anggota KIM untuk menulis berita bahkan tanpa kemampuan jurnalistik sekalipun.

Aplikasi Guinema ini adalah aplikasi dimana pengguna dipandu untuk membuat berita. Dalam aplikasi ini terdapat kerangka berita yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dengan cara menjawab yang sudah dicontohkan serta terdapat icon untuk menambahkan foto sehingga memberikan kesan yang pas. Setelah selesai, maka pengguna akan menerima berita yang sudah jadi dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu melalui aplikasi Guinema tersebut. Aplikasi Guinema log in melalui email masing-masing, setelah selesai membuat berita maka akan ada pemberitahuan dari email yang berupa berita sudah tersusun rapi.

Aplikasi ini akan memudahkan KIM dalam memproduksi sebanyak-banyaknya informasi tanpa harus merasa kesulitan dalam menyusun berita. Karena banyaknya keluhan yang dihadapi oleh KIM saat membuat berita. Dengan inovasi berupa aplikasi Guided News Maker (GUINEMA), KIM yang awalnya kesulitan dalam membuat berita, kini mereka lebih bisa membuat berita yang bagus baik secara isi, organisasi paragraf, maupun tata bahasa.

5. SILANG (INFORMASI KEHILANGAN)

Radio Suara Lumajang sebagai LPPL menangkap kebutuhan masyarakat atas pelayanan publikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah kebutuhan publikasi berita kehilangan di media massa (radio) sebagai salah satu syarat untuk pengurusan dokumen pribadi yang hilang. Hasil dari Program Pelayanan Informasi Berita Kehilangan ada 2 manfaat, yaitu masyarakat dengan mudah bisa menyebarkan informasi kehilangannya ke masyarakat luas dengan harapan dokumen yang hilang bisa ditemukan, manfaat yang kedua adalah masyarakat bisa memperoleh dokumen bukti siar di radio sebagai syarat untuk mengurus atau membuat dokumen pribadi yang hilang.

Prestasi yang dicapai :

1. PPID Kabupaten Lumajang
berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi PPID Kab/Kota se-Jawa Timur, Kabupaten Lumajang berada pada peringkat 14 dengan Kategori C (Kurang Informatif) dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Akan Tetapi PPID Kabupaten Lumajang memperoleh penghargaan sebagai Nominator Penyedia Informasi Berkala terbaik Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur tahun 2021 yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

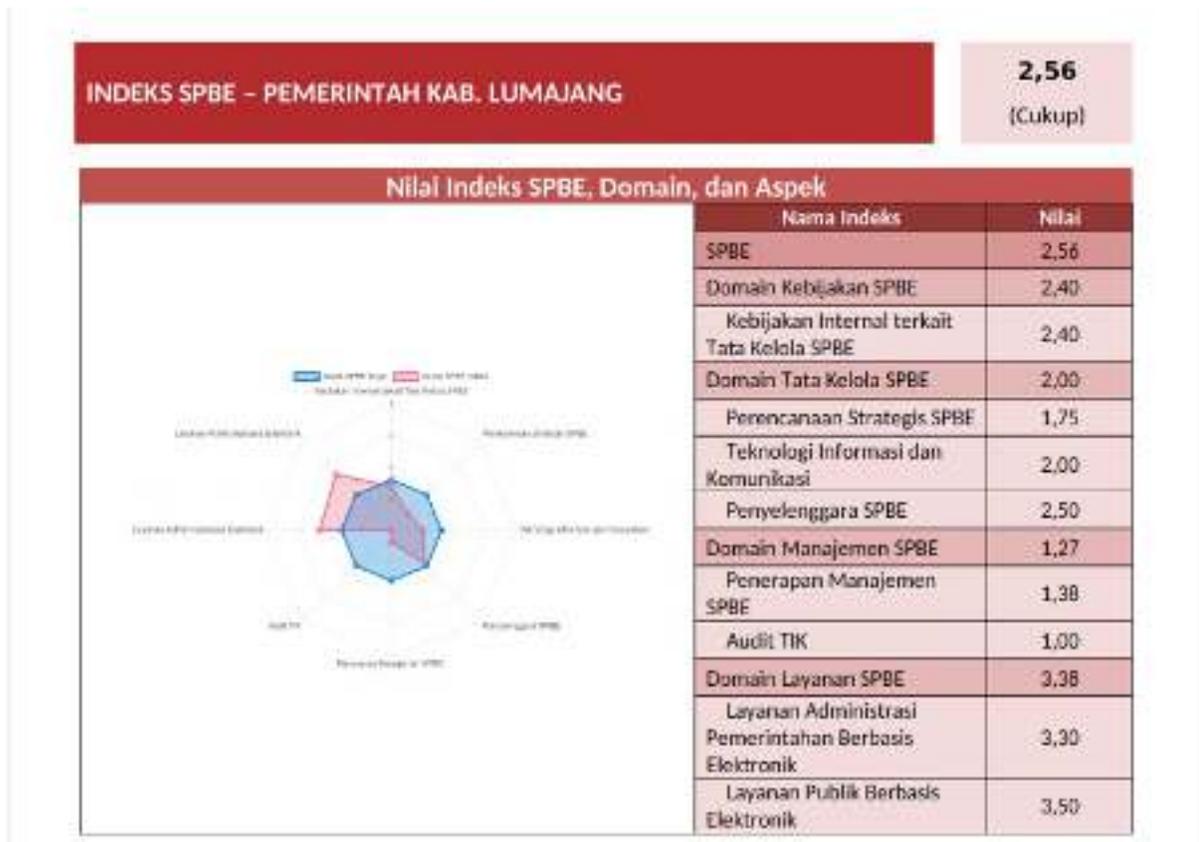


2. Indeks SPBE yang semula pada tahun 2020 mendapat Predikat baik dengan Nilai 3,20 (gambar 1) dan Pada Tahun 2021 nilainya turun menjadi predikat cukup dengan nilai 2,56 (gambar 2).



Gambar 2. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2020

Gambar 3. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Jumlah dana APBD dan DBHCHT serta Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	Rp. 1.201.353.609,00	Rp. 1.198.924.891,00	99,80
2	Tunjangan keluarga	Rp. 123.707.744,00	Rp. 123.338.540,00	99,70
3	Tunjangan jabatan	Rp. 170.230.000,00	Rp. 169.230.000,00	99,41
4	Tunjangan fungsional umum	Rp. 22.965.000,00	Rp. 22.890.000,00	99,67
6	Tunjangan beras	Rp. 63.761.485,00	Rp. 63.438.960,00	99,49

7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 1.395.200,00	Rp. 1.331.356,00	95,42
8	Pembulatan gaji	Rp. 21.575,00	Rp. 18.537,00	85,92
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp. 2.491.425,00	Rp. 2.465.386,00	98,95
10	Iuran jaminan kematian ASN	Rp. 7.454.100,00	Rp. 7.396.205,00	99,22
11	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 924.244.001,00	Rp. 920.748.590,00	99,62
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG	Rp. 2.517.624.139,00	Rp. 2.509.782.465,00	99,69

BELANJA LANGSUNG

BIDANG	: SEKRETARIAT			
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.304.000,00	2.304.000,00	100,00	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Hasil/Wujud Kegiatan
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.304.000,00	2.304.000,00	100,00	
Belanja Barang & Jasa	2.304.000,00	2.304.000,00	100,00	<u>Realisasi digunakan untuk:</u> - Belanja Lembur Rp. 2.304.000,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2.125.000,00	2.119.000,00	99,72	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	2.125.000,00	2.119.000,00		- Belanja Lembur Rp. 2.119.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	518.000,00	516.000,00	99,61	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 516.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	680.000,00	673.000,00	98,97	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 673.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.445.000,00	1.405.000,00	97,23	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 673.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.517.624.139,00	2.509.782.465,00	99,69	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Pegawai				- Belanja Pegawai Rp. 2.509.782.465,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.526.960,00	47.710.905,00	94,43	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Pegawai	42.186.960,00	39.422.905,00	93,45	- Belanja Lembur Rp. 673.000,00
Belanja Barang & Jasa	8.340.000,00	8.288.000,00	99,38	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	888.000,00	884.000,00	99,55	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 884.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	480.000,00	464.000,00	96,67	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 464.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 1.470.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.264.000,00	3.257.000,00	99,79	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 3.257.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	888.000,00	884.000,00	99,55	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 884.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.586.340,00	4.586.340,00	100,00	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	4.586.340,00	4.586.340,00	100,00	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp. 4.586.340,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.435.310,00	79.543.900,00	97,68	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 11.193.200,00
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp. 60.300.000,00
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Rp. 3.600.000,00
				- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.450.700,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.741.850,00	23.270.800,00	98,02	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 23.270.800,00
Penyediaan Bahan/Material	2.102.100,00	1.440.000,00	68,50	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.440.000,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.650.000,00	3.551.000,00	76,37	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 3.551.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.771.000,00	106.484.780,00	88,91	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 91.796.380,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 14.688.400,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	616.000,00	600.000,00	97,40	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 600.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.728.000,00	1.722.000,00	99,65	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Lembur Rp. 1.722.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.447.968,00	172.172.164,00	84,63	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Tagihan Telepon Rp. 15.541.028,00
				- Belanja Tagihan Air Rp. 511.250,00
				- Belanja Tagihan Listrik Rp. 149.799.886,00

				- Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 6.320.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.873.000,00	238.192.484,00	98,89	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 148.800.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 18.000.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 18.000.000,00
				- Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 600.000,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 47.847.060,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 2.197.965,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 2.747.459,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.818.000,00	87.976.425,00	95,82	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>

Belanja Barang & Jasa				- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 56.887.876,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 29.999.049,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 1.089.500,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 16.250.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 6.000.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 7.000.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 3.250.000,00

Program	: INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	27.275.000,00	27.256.666,00	99,93	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	27.275.000,00	27.256.666,00	99,93	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.600.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 20.400.000,00
				- Belanja Kawat /Faksimili/Internet /TV Berlangganan Rp. 1.301.666,00
				- Belanja Lembur Rp. 1.955.000,00
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	136.360.000,00	136.302.000,00	99,96	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	136.360.000,00	136.302.000,00	99,96	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 106.800.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 9.142.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 20.360.000,00

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	208.398.000,00	208.285.000,00	99,95	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	208.398.000,00	208.285.000,00	99,95	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 166.800.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 17.290.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 24.195.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	288.981.000,00	267.862.666,00	92,69	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	288.981.000,00	267.862.666,00	92,69	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 61.600.000,00
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 45.138.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 42.000.000,00
				- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 4.751.666,00
				- Belanja Lembur Rp. 28.523.000,00

				- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 49.850.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Rp. 36.000.000,00
Pelayanan Informasi Publik	50.380.000,00	49.646.980,00	98,55	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	50.380.000,00	49.646.980,00	98,55	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 255.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 42.000.000,00
				- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 3.483.980,00
				- Belanja Lembur Rp. 3.908.000,00
Layanan Hubungan Media	350.749.330,00	347.090.380,00	98,96	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Pegawai	4.738.380,00	4.738.380,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 4.738.380,00

- Belanja Barang & Jasa	346.010.950,00	342.352.000,00	98,94	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 19.710.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 40.800.000,00
				- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp. 277.500.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 4.342.000,00
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0,00	0,00	0,00	0,00
Manajemen Komunikasi Krisis	147.900.000,00	147.100.000,00	99,46	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	147.900.000,00	147.100.000,00	99,46	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 17.100.000,00
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 7.000.000,00
				- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 3.000.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 120.000.000,00

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45.419.000,00	43.309.000,00	95,35	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	45.419.000,00	43.309.000,00	95,35	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 924.000,00
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.700.000,00
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.900.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.600.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 1.955.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 230.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 12.000.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	255.085.000,00	251.681.671,00	98,67	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	255.085.000,00	251.681.671,00	98,67	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>

				- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp.2.752.382,00
				- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 4.159.600,00
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 73.020.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 84.000.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 18.000.000,00
				- Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Rp. 13.860.231,00
				- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 4.214.095,00
				- Belanja Lembur Rp. 8.859.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM Rp. 40.416.363,00
				- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 2.400.000,00
Program	: APLIKASI INFORMATIKA			

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/ Wujud Kegiatan
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	150.000,00	55.000,00	36,67	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	150.000,00	55.000,00	36,67	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 55.000,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.788.000,00	7.788.000,00	100,00	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	7.788.000,00	7.788.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Lembur Rp. 7.788.000,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.328.000,00	11.328.000,00	100,00	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	11.328.000,00	11.328.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Lembur Rp. 11.328.000,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	496.117.200,00	489.818.200,00	98,73	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	4.419.600,00	4.419.600,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>

				- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 4.419.600,00
- Belanja Barang & Jasa	491.697.600,00	485.398.600,00	98,72	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 44.400.000,00
				- Belanja Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 440.998.600,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	3.000.000,00	2.982.600,00	99,42	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	3.000.000,00	2.982.600,00	99,42	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.982.600,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	68.400.000,00	66.400.000,00	97,08	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	68.400.000,00	66.400.000,00	97,08	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 66.400.000,00
Program	: PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/ Wujud Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	819.500,00	814.000,00	99,33	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	819.500,00	814.000,00	99,33	<u>Realisasi</u> <u>Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 814.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2.250.000,00	2.244.700,00	99,76	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	2.250.000,00	2.244.700,00	99,76	<u>Realisasi</u> <u>Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.244.700,00
Membangun Metadata Statistik	28.860.000,00	28.860.000,00	100,00	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	28.860.000,00	28.860.000,00	100,00	<u>Realisasi</u> <u>Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 24.000.000,00
				- Belanja Jasa Lembur Rp. 4.860.000,00
Program	: PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/ Wujud Kegiatan

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.000.000,00	18.000.000,00	60,00	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	30.000.000,00	18.000.000,00	60,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp. 18.000.000,00

BIDANG	: INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Program	: Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik	145.262.500	132.662.531	91,33	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	4.725.000	3.450.000	73,02	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 3.450.500,00
- Belanja Barang & Jasa	140.537.500	129.212.531	91,94	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja spanduk/baliho/banner habis Rp. 180.500,00 - Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 1.039.031,00 - Belanja dekorasi Rp. 545.000,00 - Belanja penggantian transport Rp. 27.100.000,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 2.700.000,00 - Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 600.000 - Belanja cetak dan penggandaan Rp. 5.750.000,00 - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Rp. 6.000.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 11.910.000,00 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 16.200.000,00 - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 42.000.000,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 6.688.000,00 - Belanja hadiah uang tunai Rp. 6.500.000,00 - Belanja hadiah barang Rp. 2.000.000,00
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<i>Penyelenggaraan Informasi Publik</i>	129.680.000	107.454.859	82,86	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	4.420.000	4.420.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 165.000,00
- Belanja Barang & Jasa	127.970.000	107.289.859	83,84	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 1.320.803,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Belanja dekorasi Rp. 800.000,00 - Belanja penggantian transport Rp. 2.500.000,00 - Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 15.350.000,00 - Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 1.250.000,00 - Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan Rp. 2.632.000,00 - Belanja sewa rumah/gedung/parkir/tempat Rp. 4.020.000,00 - Belanja sewa penginapan Rp. 8.460.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.020.000,00 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 16.100.000,00 - Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 7.452.000,00 - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 36.900.000,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 4.605.000,00
Program		: Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	

Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	693.606.250	638.325.000	92,03	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	0	0	0	
- Belanja Barang & Jasa	693.606.250	638.325.000	92,03	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek Rp. 75.200.000,00 - Belanja dekorasi Rp. 1.750.000,00 - Belanja jasa promosi/publikasi/advertising Rp. 357.375.000,00 - Belanja penggantian transport Rp. 96.550.000,00 - Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli Rp. 17.625.000,00 - Belanja jasa pendukung kegiatan Rp. 5.550.000,00 - Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan Rp. 9.500.000,00 - Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Rp. 15.000.000,00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu Rp. 46.125.000,00
Program	: Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan

Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	42.900.000	36.980.901	86,20	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	1.200.000	1.200.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 1.200.000,00
- Belanja Barang & Jasa	140.537.500	129.212.531	91,94	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja telepon Rp. 4.480.901,00 - Belanja sewa rumah/gedung/gudang/par kir/tempat Rp. 18.000.000,00 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.100.000,00 - Belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan Rp. 0 - Belanja pemeliharaan bangunan menara telekomunikasi Rp. 11.000.000,00
BIDANG	: APLIKASI INFORMATIKA			
Program	: Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	805.400.200	759.389.551	94,29	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal</i>
- Belanja Pegawai	6.336.000	6.336.000	100	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> - Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Rp. 6.336.000,00
- Belanja Barang & Jasa	558.656.000	521.828.411	93,41	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> - Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 431.632.411,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 44.400.000,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 16.992.000,00 - Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan Rp. 46.804.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.808.200	70.969.000	96,15	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja modal home use Rp. 1.540.000,00 - Belanja modal personal komputer Rp. 41.800.000,00 - Belanja modal peralatan personal komputer Rp. 1.881.000,00 - Belanja modal peralatan jaringan Rp. 25.748.000,00 - Belanja modal aset tak berwujud software komputer Rp. 60.933.000,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.600.000	99.323.140	98,73	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja modal jaringan internet Rp. 99.323.140
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
<i>Pemberdayaan Informatika</i>	379.657.000	363.774.080	95,82	
Belanja Pegawai	0	0	0	-
Belanja Barang & Jasa	379.657.000	363.774.080	95,82	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja penggantian transport Rp. 2.400.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 14.896.080,00 - Belanja konsultasi IT Rp. 266.750.000,00

				<ul style="list-style-type: none"> - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 68.400.000,00 - Belanja tambahan upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 11.328.000,00
Program : <i>Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</i>				
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hasil/Wujud Kegiatan
Layanan Data dan Statistik	259.724.000	256.926.600	98,92	<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	0	0	0	-
- Belanja Barang & Jasa	180.725.000	180.175.000	99,70	<u>Realisasi digunakan untuk :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja kawat/faksimili/internet Rp. 191.400.000,00 - Belanja cetak Rp. 21.260.000,00 - Belanja modal personal komputer Rp. 11.935.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.667.600,00 - Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan Rp. 29.664.000,00 - Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan Rp. 5.664.000,00

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi anggaran mencapai Rp. 7.495.116.456,00 atau 86,78% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.637.294.442,00 ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efektif dan efisien. Faktor utama penyebab beberapa permasalahan dalam merealisasikan anggaran adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.

Selanjutnya Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi *covid-19* sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Hasil Penilaian Capaian Kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah *blank spot* teknologi informasi komunikasi (TIK) dan *Blank Spot* pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
6. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika
7. *Refocusing/* Efisiensi anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait pandemi *covid-19* sehingga banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkibat terhadap upaya pencapaian kinerja.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website.
2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa Pengembangan

J

jaringan Telekomunikasi Fiber Optik dan hotspot di wilayah publik (lingkup Kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan Desa.

3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Lumajang dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, dan website).
4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di OPD.
5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/ pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.
7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
8. Menyediakan ketersediaan kebutuhan data yang mutakhir yang bisa diakses oleh Masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 17 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG


I. PAIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19870606 199202 1 001